

**RENCANA AKSI PROGRAM  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
TAHUN 2015-2019**



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN KEMENKES RI  
Jakarta, 2015**

## KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Program (RAP) adalah dokumen perencanaan Unit Utama Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, sebagai salah satu dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah setiap tahun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk unit kerja dibawahnya, untuk menyiapkan rencana startegis unit kerja.



Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), selaku Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke III Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Aksi Program Tahun 2015-2019 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan baik Kantor Pusat maupun Kantor Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) masing-masing, termasuk juga dalam penetapan kegiatan dan anggaran tahunan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi, koordinasi serta bekerjasama untuk proses penyusunan Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (BPPSDMK).

Semoga Rencana Aksi Program ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung demi kemajuan dan perkembangan SDM Kesehatan di Indonesia.

Jakarta, 31 Agustus 2015

 Kepala Badan PPSDM Kesehatan 

Usman Sumantri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN	
TAHUN 2015-2019	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum, Potensi dan Tantangan.....	2
1. Kondisi Umum.....	2
2. Potensi dan Tantangan .....	3
C. Maksud dan Kegunaan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan.....	4
D. Pengertian.....	4
E. Tata Urut.....	6

BAB II       VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi .....	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan .....	9
D. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan .....	10

**BAB III        SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,  
KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN BADAN PPSDM KESEHATAN**

A. Sasaran Strategis Badan PPSDM Kesehatan .....13

B. Indikator Tujuan Badan PPSDM Kesehatan.....13

C. Sasaran Badan PPSDM Kesehatan .....13

D. Strategi Badan PPSDM Kesehatan .....13

E. Kegiatan Badan PPSDM Kesehatan.....14

F. Kerangka Regulasi.....14

G. Kerangka Kelembagaan .....15

**BAB IV        TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

A. Target Kinerja .....16

B. Kerangka Pendanaan .....23

**BAB V PENUTUP.....24**

**LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1        : Matriks Kinerja
- LAMPIRAN 2        : Matriks Alokasi Pendanaan

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR SINGKATAN**

**KONTRIBUTOR**





# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)

Telepon : Pusrengun SDM (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977

Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822 Fax : 7258057

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2015 NOMOR : HK.02.03/L.1/008232/2015

#### TENTANG

#### RENCANA AKSI PROGRAM

#### BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA

#### BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan dinamika serta kebutuhan dan kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, perlu disusun Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2015-2019;
  - b. bahwa Rencana Aksi Program sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat kegiatan-kegiatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan beserta para pemangku kepentingan terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015-2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);
  - 3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

### SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)

Telepon : Pusrengun SDMK (021) 7258830 Fax : 7258616 Pustdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977

Pustdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822 Fax : 7258057

5. Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 101);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2015 – 2019**
- KESATU : Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan guna mendukung program pembangunan kesehatan.





# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

### SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)

Telepon : Pusrengun SDM (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977

Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pustanserdikjut (021) 7257822 Fax : 7258057

---

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Agustus 2015

KEPALA, *[Signature]*

*[Signature]*

Usman Sumantri  
NIP. 195908121986111001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan periode Tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional; 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategis pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; dan 3) jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah

- 1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
- 2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
- 3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
- 4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan
- 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
- 6) Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyatakan bahwa “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan diselenggarakan melalui 4 (empat) upaya pokok, yaitu (1) perencanaan SDM Kesehatan, (2) pengadaan SDM Kesehatan, (3) pendayagunaan SDM Kesehatan serta (4) pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan”.



Dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan perlu disusun suatu rencana aksi program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang berisi tujuan, sasaran, strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan pada Tahun 2015- 2019.

## **B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN**

### **1. Kondisi Umum**

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan dan masuk pada sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 adalah terpenuhinya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut pendataan Badan PPSDMK terkait jumlah SDM Kesehatan pada Tahun 2012 yang tercatat sebanyak 707.234 orang telah meningkat menjadi 877.098 orang pada Tahun 2013. SDM kesehatan ini terdiri atas 681.644 orang tenaga kesehatan dan 195.454 orang tenaga non kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 90.454 orang tenaga medis, 288.405 orang perawat, 137.110 orang bidan, 40.181 orang tenaga farmasi, dan 125.494 tenaga kesehatan lainnya.

Dari seluruh SDM kesehatan yang ada, sebanyak 295.306 orang bekerja di Puskesmas. Dengan jumlah Puskesmas yang 9.655 buah saat ini, maka berarti rata-rata di tiap Puskesmas bekerja 30 s/d 31 (30,76) orang SDM kesehatan. Namun demikian faktanya tidak demikian, karena ternyata persebaran SDM kesehatan tersebut tidak merata. Beberapa puskesmas yang mempunyai rata-rata SDM kesehatan cukup banyak adalah puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau (56 orang per puskesmas) dan puskesmas di Provinsi Aceh (55 orang per puskesmas), sedangkan puskesmas yang mempunyai rata-rata jumlah SDM kesehatan paling rendah adalah puskesmas di Provinsi Papua (14 orang per puskesmas) dan puskesmas di Provinsi Papua Barat (15 orang per puskesmas). Selain itu, dari 295.306 orang SDM kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut, komposisi jenis tenaganya pun masih sangat tidak berimbang. Data pada dokumen rencana kebutuhan SDMK Tahun 2014 menunjukkan bahwa ratio dokter per puskesmas adalah 1,8, perawat 10,8, perawat gigi 1,1, bidan 10,28, tenaga kesehatan masyarakat 2,17, sanitarian 1,1, dan tenaga gizi 1,0.

Kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut pada Tahun 2013 mencapai 26,3% (26,27%) dokter spesialis anak, 22,4% (22,45%) dokter spesialis kandungan, 29,8% (29,79%) dokter spesialis bedah, dan 25,5% (25,51%) dokter spesialis penyakit dalam. Pada Tahun 2013, sekretariat KKI mencatat dokter umum yang memiliki STR berjumlah 94.727 orang, sehingga rasio dokter umum sebesar 38 orang dokter per

100.000 penduduk. Angka ini sudah mencapai target renstra Kemenkes sebelumnya sebesar 30 orang dokter per 100.000 penduduk. Namun terdapat disparitas yang cukup besar antar Provinsi di Indonesia, dimana rasio terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8,9 orang dokter per 100.000 penduduk dan rasio tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar 156 orang dokter per 100.000 penduduk. Padahal menurut rekomendasi WHO seharusnya 10 orang dokter umum per 10.000 penduduk. Sementara itu, mutu lulusan tenaga kesehatan juga masih belum menggembirakan. Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi masih belum banyak, yakni dokter 71,3%, dokter gigi 76%, perawat 63%, D3 keperawatan 67,5%, dan D3 kebidanan 53,5%. Jumlah dan mutu tenaga medis, perawat, dan bidan dirasa masih kurang. Tetapi tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, gizi, dan penyuluh kesehatan yang tugas utamanya melakukan upaya promotif dan preventif, bahkan masih sangat kurang.

Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang peran utamanya adalah promotif-preventif, ternyata jenis dan proporsi tenaganya masih didominasi oleh kuratif rehabilitatif, karena yang betul-betul petugas kesehatan masyarakat hanya 12,38%.

Untuk mutu dari petugas kesehatan, bisa dilihat dari kualitas institusi pendidikannya. Menurut data Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sampai dengan 31 Maret 2013 institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi (tenaga medis) yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia berjumlah 75 Fakultas Kedokteran (FK) dan 30 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) .

Menurut data Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Kemenkes ada 38 Politeknik kesehatan kemenkes dengan 395 program studi yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah program studi Diploma III sebanyak 262 Prodi, Diploma IV sebanyak 133 Prodi.. Masa berlaku akreditasi yang berakhir sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 141 prodi, pada Tahun 2016 sebanyak 189 prodi.

Jumlah dosen di seluruh Poltekkes Kemenkes sebanyak 3.894 orang dengan rincian kualifikasi pendidikan dosen, pendidikan D4/S1 sebanyak 843 orang, S2 sebanyak 2.944 orang dan S3 sebanyak 107 orang. Jumlah dosen yang sudah tersertifikasi berjumlah 2.905 orang dan jumlah mahasiswa sebanyak 68.288 orang.

## **2. Potensi Dan Tantangan**

Mencermati kondisi umum dan permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan ke depan akan menghadapi tantangan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan tenaga kesehatan masyarakat khususnya untuk Puskesmas dan jenjang institusi di atasnya.
- b. Peningkatan sosialisasi dan advokasi dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah-pemerintah Daerah untuk menambah formasi dan rekrutmen tenaga kesehatan, khususnya tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, analis kesehatan dan tenaga gizi.
- c. Penerapan sistem insentif finansial dan non-finansial yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga-tenaga kesehatan bekerja di daerah, khususnya di bagian timur Indonesia, di perdesaan, dan di DTPK.
- d. Pelaksanaan sistem subsidi, beasiswa dan ikatan dinas bagi pendidikan tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, dan tenaga gizi.
- e. Penerapan standarisasi mutu tenaga kesehatan melalui akreditasi institusi pendidikan dan uji kompetensi yang efektif.
- f. Penguatan regulasi untuk menjamin pengadaan tenaga kesehatan, mutu tenaga kesehatan, dan pemerataan persebarannya.
- g. Peningkatan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

### **C. MAKSUD DAN KEGUNAAN RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN**

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan Tahun 2019, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang meliputi : upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

### **D. PENGERTIAN**

Ada beberapa pengertian yang dipergunakan dalam Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional antara lain :

## **1. Kesehatan**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

## **2. Pembangunan Kesehatan**

Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis.

## **3. Sistem Kesehatan Nasional**

Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## **4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi : upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## **5. Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan**

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.

## **6. Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.



## **7. Perencanaan SDM Kesehatan**

Perencanaan SDM Kesehatan adalah Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

## **8. Pengadaan SDM Kesehatan**

Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan.

## **9. Pendayagunaan SDM Kesehatan**

Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan SDM Kesehatan.

## **10. Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan**

Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

## **E. TATA URUT**

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SK RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Potensi dan Permasalahan
- C. Maksud dan Kegunaan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan
- D. Pengertian
- E. Tata Urut

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan Kementerian Kesehatan
- D. Sasaran Kementerian Kesehatan

### BAB III. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, KEGIATAN , KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BADAN PPSDM KESEHATAN

- A. Sasaran Strategi
- B. Indikator Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan
- D. Strategi
- E. Kegiatan
- F. Kerangka Regulasi
- G. Kerangka Kelembagaan

### BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A.Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

LAMPIRAN 2 : Matriks Kerangka Regulasi

### DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR SINGKATAN

### KONTRIBUTOR

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI**

Rencana Aksi Program tidak memiliki visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

#### **B. MISI**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

### C. TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Terdapat dua tujuan strategis Kementerian Kesehatan pada Tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact atau outcome*). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.



#### **D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN**

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
  - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
  - c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
  - b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
  - c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
  - d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia  $\leq 18$  tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.
  - b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
  - b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
  - c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
  - b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
  - c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
  - b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
  - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
  - c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
  - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
  - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis litbang kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
  - c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
  - a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara  $\leq 1\%$  sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan adalah meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
  - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
  - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

**BAB III**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,**  
**KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**  
**BADAN PPSDM KESEHATAN**

**A. SASARAN STRATEGIS BADAN PPSDM KESEHATAN**

Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan Tenaga Kesehatan

**B. INDIKATOR TUJUAN BADAN PPSDM KESEHATAN**

Indikator yang dipergunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian arah kebijakan adalah :

1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.
2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

**C. SASARAN BADAN PPSDM KESEHATAN**

Sasaran yang akan dicapai Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2019 adalah :

1. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang mencapai 60 %.
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.

**D. STRATEGI BADAN PPSDM KESEHATAN**

Dalam upaya mencapai sasaran pokok dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan pada Tahun 2019, ditempuh berbagai strategi sebagai berikut :

1. Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis Tim (*Team Based*).
2. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik
3. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan
4. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu



5. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan
6. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan
7. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan
8. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh
9. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.
10. Pengembangan sistem kinerja.

#### **E. KEGIATAN BADAN PPSDM KESEHATAN**

Dalam rangka upaya pencapaian sasaran yang akan dicapai Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan pada Tahun 2019, dilakukan berbagai upaya melalui kegiatan :

1. Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM kesehatan.
2. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan
3. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur.
4. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
5. Meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi.
6. Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan.
7. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan
8. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.
9. Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan.
10. Meningkatnya dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan.

#### **F. KERANGKA REGULASI**

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit eselon II dapat berjalan dengan baik, selain didukung dengan kerangak pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional.

Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan dan tenaga kesehatan; 2) meningkatkan perencanaan, pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan; 3) peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan; 4) penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan;

5) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan; 6) penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes RI yang berkualitas; dan 7) peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri dan surat edaran menteri , termasuk Keputusan serta SE Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

## **G. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan dalam upaya mendukung pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Kementerian Kesehatan; 2) penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK program dan kegiatan; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan ; 4) penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 5) penguatan program dan kegiatan prioritas.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan salah satu program teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan terbagai menjadi 10 kegiatan, yang meliputi :

1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan
2. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
3. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
4. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
5. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
7. Perencanaan SDM Kesehatan
8. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
9. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

#### **A. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir Tahun 2019. Sasaran kinerja kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada Tahun 2019 :

##### **1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan**

Sasaran Kegiatan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan adalah Terselenggaranya standardisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi SDM Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran kegiatan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan, dilaksanakan melalui :

##### **a. Perencanaan dan Program :**

###### **1) Perencanaan meliputi :**

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran sebanyak 11 dokumen

###### **2) Program meliputi :**

Jumlah dokumen pengelolaan program sebanyak 10 dokumen

##### **b. Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan:**

###### **1) Standarisasi SDM Kesehatan meliputi :**

Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan profesi tenaga kesehatan

Sebanyak 12 dokumen

2) **Sertifikasi SDM Kesehatan** meliputi :

Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 1.290.000 orang.

c. **Ketatausahaan Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan SDM Berkelanjutan** meliputi :

1) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.

2) Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen

## 2. **Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan**

Sasaran kegiatan Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran melalui kegiatan **Pendidikan Berkelanjutan Tugas Belajar**, dilaksanakan melalui :

a. **Pendidikan Berkelanjutan** meliputi :

1) Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS berjumlah 2.400 orang.

2) Jumlah dokumen pengembangan keprofesian kesehatan berkelanjutan dalam rangka penjaminan mutu SDM Kesehatan berjumlah 10 dokumen.

b. **Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata**

1) Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan Diploma dan strata mencapai 4.800 orang.

2) Jumlah dokumen evaluasi pemberian bantuan pendidikan Diploma dan Strata berjumlah 5 dokumen.

## 3. **Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**

Sasaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, dilaksanakan melalui :

a. **Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Mutu**

1) **Perencanaan dan Pengembangan** meliputi :

a) Jumlah dokumen bahan rencana kegiatan dan anggaran pelatihan aparatur sebanyak 5 dokumen.

b) Jumlah dokumen laporan hasil analisis kebutuhan pelatihan sebanyak 5 dokumen.

- 2) **Pengendalian Mutu** meliputi :
  - a) Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusdiklat Aparatur sebanyak 10 dokumen.
  - b) Jumlah laporan hasil akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi sebanyak 10 dokumen.
- b. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan**
  - 1) **Diklat Kepemimpinan** meliputi :
    - a) Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan kepemimpinan yang sudah terakreditasi mencapai 14.000 orang.
  - 2) **Manajemen Kesehatan** yang meliputi :
    - a) Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan manajemen yang terakreditasi mencapai 4.000 orang.
- c. Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan :**
  - 1) **Diklat Teknis Kesehatan** yang meliputi :
    - a) Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan yang sudah terakreditasi mencapai 22.500 orang.
  - 2) **Diklat Fungsional Kesehatan** yang meliputi :
    - a). Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan fungsional kesehatan yang sudah terakreditasi mencapai 4.500 orang.
- d. Ketatausahaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur** yang meliputi
  - 1) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.
  - 2) Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan**

Sasaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan adalah meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dilaksanakan melalui :

- a. Program dan Pengembangan :**
  - 1) **Program** meliputi :
    - a) Jumlah dokumen kajian pendidikan sebanyak 10 dokumen
  - 2) **Pengembangan** meliputi :
    - a) Jumlah dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan JPM/DI ke DIII sebanyak 25 dokumen.

**b. Pendidikan dan Pelatihan :**

**1) Pendidikan** meliputi :

- a) Jumlah dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan sebanyak 30 dokumen.

**2) Pelatihan** meliputi :

- a) Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan sebanyak 11.910 orang.

**c. Ketatausahaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan** yang meliputi :

- 1) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.
- 2) Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen

**5. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi**

Sasaran kegiatan pengelolaan mutu pendidikan tinggi adalah meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan **Pengendalian Mutu**, dilaksanakan melalui :

**a. Standarisasi** meliputi :

- 1). Jumlah dokumen standar pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 15 dokumen

**b. Pemantaun** meliputi :

- 1) Persentase program studi/institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes yang terakreditasi baik sebesar 80 %.

**6. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan**

Sasaran kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan, dilaksanakan melalui :

**a. Pendayagunaan SDM Kesehatan SDM Kesehatan Dalam Negeri :**

**1) Distribusi SDM Kesehatan** yang meliputi :

- a) Jumlah dokter spesialis yang ditempatkan di Rumah Sakit sebanyak 1.370 orang.
- b) Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti penugasan khusus individual berbasis tim (tim nusantara sehat) sebanyak 5.590 orang.
- c) Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan khusus perseorangan sebanyak 22.370 orang.

- b. **SDM Kesehatan Luar Negeri** yang meliputi :
  - 1) **Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri** yang meliputi :
    - a) Jumlah tenaga kerja kesehatan indonesia yang disiapkan untuk didayagunakan ke luar negeri sebanyak 270 orang.
  - 2) **Pendayagunaan SDM Asing di Indonesia** yang meliputi :
    - a) Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan warga negara asing sebanyak 34 propinsi.
- c. **Ketatausahaan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan** yang meliputi:
  - 1) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen.
  - 2) Jumlah dokumen kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen

## 7. Perencanaan SDM Kesehatan

Sasaran kegiatan perencanaan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM kesehatan, dilaksanakan melalui :

- a. **Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan** meliputi :
  - 1) Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Nasional sebanyak 11 dokumen
- b. **Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan** meliputi :
  - 1) Jumlah dokumen kajian pengembangan SDM kesehatan sebanyak 6 dokumen.

## 8. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Sasaran kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes RI meliputi :

- a. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 100.000 orang.
- b. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarannya sebanyak 38 satker.
- c. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 760 kegiatan.
- d. Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik yang diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi nasional/internasional sebanyak 395 penelitian.

## 9. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan adalah terselenggaranya pelaksanaan *internship* tenaga kesehatan. Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan **Pengembangan SDM Kesehatan** yang meliputi :

- 1) Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship sebanyak 32.500 orang.

## **10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.**

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### **a. Penyusunan Program, Pengelolaan Informasi serta Pemantauan Evaluasi dan pelaporan :**

- 1) **Program dan Anggaran** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang sebanyak 6 dokumen
  - b) Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan sebanyak 15 dokumen
- 2) **Data dan Informasi** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen data dan informasi Program PPSDM Kesehatan sebanyak 136 dokumen.
- 3) **Evaluasi dan Pelaporan** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 11 dokumen.

### **b. Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat :**

- 1) **Hukum** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan yang disusun sebanyak 100 dokumen.
  - b) Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang tertangani sebanyak 50 masalah hukum.
- 2) **Organisasi** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen organisasi dan ketatalaksanaan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 6 dokumen.
- 3) **Hubungan Masyarakat** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah jenis media informasi terkait Program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak sebanyak 7 jenis.



**c. Pelaksanaan Keuangan dan Perlengkapan :**

- 1) **Perbendaharaan** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan berjumlah 5 dokumen.
  - b) Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APIP ( Itjen, BPK dan BPKP ) sebesar 80 %.
- 2) **Verifikasi dan Akutansi** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen Laporan Keuangan Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berjumlah 10 dokumen.
  - b) Jumlah dokumen rekonsiliasi Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan dengan satker BLU sebanyak 20 dokumen
  - c) Jumlah dokumen rekonsiliasi laporan keuangan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan dengan satker PNPB sebanyak 20 dokumen.
- 3) **Rumah Tangga dan Perlengkapan** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen yang berisi Laporan SIMAK BMN Sekretariat BPPSDM Kesehatan Semester I dan Semester II (Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal berjumlah 10 dokumen.
  - b) Jumlah dokumen laporan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen

**d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha :**

- 1) **Pengembangan Pegawai** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen terkait dengan usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat Teknis, Diklat Fungsional sebanyak 5 dokumen.
  - b) Jumlah dokumen usulan pegawai yang akan mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 5 dokumen.
- 2) **Perencanaan dan Mutasi Pegawai** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
  - a) Jumlah dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
  - b) Jumlah dokumen mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
  - c) Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen.

**3) Tata Usaha dan Gaji** dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

- a) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen.

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan program dan kegiatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada Tahun 2019 dan anggaran fungsi pendidikan. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan pada program PPSDMK maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.

Untuk mendukung upaya program PPSDMK di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui Dekonsentrasi dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

Sedangkan upaya peningkatan efektifitas pembiayaan fungsi pendidikan pada program PPSDMK maka pendanaan fungsi pendidikan diutamakan untuk peningkatan kualitas lulusan/kompetensi tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan serta pelaksanaan internship bagi tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang terbagi dalam 10 kegiatan mencapai Rp. 34.3 T dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Kebutuhan Anggaran Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	ALOKASI PENDANAAN (Rp. Milyar)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	23,0	25,0	31,0	27,0,00	29,0	135,1
2	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	446,00	463,6,0	486,0	507,10	529,3,00	2.432,0
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	173,4	179,0	188,0	196,4	205,3	942,1
4	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	20,0	21,0	22,1	23,0	24,1	110,2
5	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	24,00	25,2	26,5	27,7	28,9	132,2
6	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	18,7	2.550,3	2.949,4	3.348,4	3.947,5	12.814,3
7	Perencanaan SDM Kesehatan	0,00	49,7	50,6	51,6	52,5	204,4
8	Pelaksanaan Internship	250,00	750,00	800,00	850,00	900,00	3.550,0
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1.313,5	1.532,3	1.594,8	1.678,2	1.821,4	7.942,2
10	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	730,0	909,0	939,5	968,2	998,3	4.545,0
TOTAL		3.000,6	6.505,1	7.087,8	7.677,6	8.536,2	32.807,4

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, baik dalam perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, maupun dalam pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Oleh karena itu , Rencana Aksi Program ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan di masing-masing satker di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan untuk periode Tahun 2015-2019.

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019, diharapkan mampu menjawab tantangan, hambatan, dinamika dan kebutuhan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya untuk program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, sesuai dengan arah kebijakan yang diharapkan yaitu meningkatnya ketersediaan, penyebaran, dan kualitas SDM Kesehatan.

RAP Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ada perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN  
TAHUN 2015-2019

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	STANDARDISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI SDM KESEHATAN												
1	Perencanaan dan Program	Tersusunnya dokumen perencanaan dan program Standardisasi Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	1 Perencanaan yang meliputi :  Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran  2 Program yang meliputi : Penyusunan dokumen pengelolaan program	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran  Jumlah dokumen pengelolaan program	Dokumen perencanaan dan anggaran  Dokumen pengelolaan program Pustanserdik	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan anggaran per tahun  Menghitung jumlah dokumen pengelolaan program Pustanserdik per tahun	23.0	25.0	31.0	27.0	29.0	135.0	PUSAT STANDARDISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN
2.	Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan	Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi SDM Kesehatan	1 Standarisasi SDM Kesehatan yang meliputi : Dokumen pengembangan profesi tenaga kesehatan  2 Sertifikasi SDM Kesehatan yang meliputi : Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan  Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan  Tenaga Kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi yang Memiliki STR	Menghitung jumlah dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan per tahun  Menghitung jumlah STR Tenaga Kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi yang diterbitkan per tahun							
3	Ketatausahaan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	1 Tata Usaha (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  (b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan							
II	PENDIDIKAN TINGGI DAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN												
1.	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM	Pendidikan Berkelanjutan Tugas Belajar  1 Pendidikan Berkelanjutan yang meliputi : (a) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan PDS/PDGS	Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS	Peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS	Menghitung jumlah Peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS	446	463.6	486	507.1	529.3	2432.0	PUSAT STANDARDISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN

[illegible]

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Teknis Fungsional dan Kesehatan	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional dan kesehatan	(a) Pelatihan Manajemen Kesehatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan manajemen yang sudah terakreditasi	Aparatur yang mendapatkan sertifikat pelatihan manajemen dengan jumlah jam pembelajaran (jpl) ≥ 30 jpl dan telah sesuai ketentuan baik pada komponen kurikulum, peserta, pelatih, penyelenggara dan tempat penyelenggaraan	Berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan manajemen kesehatan maupun manajemen non kesehatan yang sudah terakreditasi							PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
			1. Diklat Teknis Kesehatan meliputi : (a) Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan yang sudah terakreditasi	Aparatur yang mendapatkan sertifikat pelatihan teknis fungsional dengan jumlah jam pembelajaran (jpl) ≥ 30 jpl dan telah sesuai ketentuan baik pada komponen kurikulum, peserta, pelatih, penyelenggara dan tempat penyelenggaraan	Berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan teknis kesehatan yang sudah terakreditasi, meliputi pelatihan teknis profesi, teknis program dan teknis umum/administrasi dan manajemen							
			2. Diklat Fungsional Kesehatan meliputi : (a) Pendidikan dan pelatihan Fungsional Kesehatan	Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan fungsional kesehatan yang sudah terakreditasi	Aparatur yang mendapatkan sertifikat pelatihan fungsional kesehatan dengan jumlah jam pembelajaran (jpl) ≥ 30 jpl dan telah sesuai ketentuan baik pada komponen kurikulum, peserta, pelatih, penyelenggara dan tempat penyelenggaraan	Berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan fungsional kesehatan yang sudah terakreditasi							
	4	Ketatausahaan Pelatihan SDM Kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan dan pelatihan Aparatur	1 Tata Usaha meliputi : (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN						
(b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan				Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan							
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN												
1	Penyusunan program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Tersusunnya rencana program dan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1) Program, meliputi (a) Kajian pendidikan tenaga kesehatan  2) Pengembangan, meliputi : (a) Pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	Jumlah dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan  Jumlah dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	Dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan seperti kajian kurikulum, program studi, dll di institusi pendidikan tenaga kesehatan  Dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III seperti pengembangan program PJJ	Penjumlahan dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan seperti kajian kurikulum, program studi, dll di institusi pendidikan tenaga kesehatan  Penjumlahan dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	20	21	22.1	23	24.1	110.2	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1) <b>Pendidikan</b> , meliputi : (a) Penyiapan bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan  2) <b>Pelatihan</b> , meliputi : (a) Pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan  Jumlah pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	Dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan seperti pedoman, kurikulum inti D-III Jamu, D-IV Teknik Radiologi, D-IV Fisioterapi, D-IV Promkes, D-III Gizi, Analisis Kesehatan, dll  Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui diklat bidang kesehatan terakreditasi yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang sudah terakreditasi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat.	Penjumlahan dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan seperti D-III Jamu, D-IV Teknik Radiologi, D-IV Fisioterapi, D-IV Promkes, D-III Gizi, Analisis Kesehatan dll  jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi							PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
3.	Ketatausahaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1 <b>Tata Usaha</b> meliputi : (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  (b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN  Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan							
V	PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI												
	Pengendalian mutu pendidikan pelatihan tenaga kesehatan	Terlaksananya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1 <b>Standarisasi</b> meliputi : (a) Penyusunan Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan  2 <b>Pemantauan</b> meliputi : (a) Pelaksanaan akreditasi bagi Prodi Poltekkes	Jumlah dokumen Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan  Persentase prodi/Institusi Poltekkes yang terakreditasi baik	dokumen standar Pendidikan Tenaga Kesehatan standar sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, dll  Jumlah program studi/ poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen.	Penjumlahan dokumen standar Pendidikan Tenaga Kesehatan standar sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, dll  Jumlah program studi/ poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen.	24	25.2	26.5	27.7	28.9	132.3	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
VI	PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN												
1.	Perencanaan dan Pendayagunaan	Meningkatnya pendayagunaan SDM	1 <b>Distribusi SDM Kesehatan</b> meliputi : (a) Penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit	Jumlah dokter spesialis yang ditempatkan di Rumah Sakit	Dokter spesialis anak, obgin, penyakit dalam, bedah, dan anastesi yang ditempatkan di Rumah Sakit	Menghitung jumlah dokter spesialis anak, obgin, penyakit dalam, bedah, dan anastesi yang ditempatkan di rumah sakit	18.7	2550.3	2949.4	3348.4	3,947,5	8866.8	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN



[illegible]

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	1. Pengembangan SDM Kesehatan meliputi :  (a) Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip	Tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi) yang melaksanakan internsip	Menghitung jumlah Tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi) yang melaksanakan internsip	250.0	750.0	800.0	850.0	900.0	3550.0	PUSAT PERENCANAAN DAN PENYANGGULANGAN SDM KESEHATAN
IX	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN												
1.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan					1,313.5	1,532.3	1,594.8	1,678.2	1,821.4	7940.2	SEKRETARIAT BADAN PPSPDM KESEHATAN
			1) Program dan Anggaran meliputi:										
			(a) Penyusunan rencana dan program Badan PPSPDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSPDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSPDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Mid term Reviu RAP dan draft RAK.	Menghitung jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang telah dibuat baik dalam bentuk bahan maupun draft							
			(b) Penyusunan program dan anggaran tahunan	Jumlah Dokumen program dan anggaran tahunan	Dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, dan RKA-K/L	Menghitung jumlah dokumen yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran							
			2) Data dan Informasi meliputi:										
			(a) Dokumen Data dan Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Indonesia	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Dokumen data dan informasi program PPSPDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan	Menghitung jumlah provinsi yang mengirimkan dokumen data dan informasi (profil) pengembangan dan pemberdayaan SDMK wilayahnya							
			3) Evaluasi dan Pelaporan meliputi:										
			(a) Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSPDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSPDM Kesehatan	Dokumen Laporan Tahunan Badan PPSPDM Kesehatan yang dihasilkan selama 1 Tahun yakni terdiri dari Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSPDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan), dan Laporan Midterm Review yang dihasilkan pada Tahun ke 3 (2017)	Menghitung jumlah dokumen Laporan Tahunan Badan PPSPDM Kesehatan yakni Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSPDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan) per Tahun, ditambah Laporan Midterm Review pada Tahun ke-3 (2017)							
	2. Pengembangan Hukum, Organisasi dan Humas	Terselenggaranya penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat											
			1) Hukum, yang meliputi :										

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			(a) Penyusunan Regulasi bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang SDM Kesehatan (Jumlah dokumen kebijakan teknis Program PPSDM Kesehatan)	Jumlah dokumen kebijakan teknis/rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan telah dilakukan pembahasan di internal PPSDM paling sedikit 2 kali. Dihitung selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun							SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
			(b) Layanan Hukum di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang tertangani	Permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani (tahap klarifikasi, peninjauan lapangan, kajian hukum, laporan, sampai penyelesaian)	Menghitung jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun							
			2) Organisasi meliputi:										
			(a) Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSDMK Kesehatan	Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan yang meliputi dokumen Bisnis Proses, Analisa Beban Kerja, Info Jabatan, Tata Hubungan Kerja, Standar Operasional Prosedur baik untuk UPT maupun Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen yang telah dibuat selama 5 Tahun dan dijabarkan setiap Tahun							
			3) Hubungan Masyarakat meliputi:										
			(a) Penyusunan dokumentasi, Informasi dan Kehumasan	Jumlah jenis media informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak.	Jenis media informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster dan roll banner terkait SDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah dokumen yang telah dibuat selama 5 Tahun dan dijabarkan setiap Tahun							
3.	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan											
			1) Perbendaharaan, yang meliputi:										
			(a) Rekonsiliasi laporan keuangan dengan Biro Keuangan Setjen Kemenkes	Jumlah dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual	Menghitung jumlah dokumen yang dibuat selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun							
			(b) Pemantauan dan Pemutakhiran TL LHP dan Pengaduan Masyarakat	Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF ( Itjen, BPK dan BPKP )	Laporan hasil pemeriksaan oleh APF yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK, dan Satker Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat dibandingkan dengan jumlah LHP keseluruhan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dikali seratus persen							
			2) Verifikasi dan Akuntansi, yang meliputi:										

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4. Kepegawaian dan Tata Usaha		(a) Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dengan satker (Pusat, UPT Vertikal dan Dekonsentrasi), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes setiap triwulan, serta melakukan reviu Laporan Keuangan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes setiap semester	2 (dua) dokumen dikali 5 (lima) tahun							SEKRETARIAT BADAN PSDM KESSEHATAN
			(b) Penyusunan Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Rekonsiliasi Laporan TRPNBP Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes serta Kementerian Keuangan setiap triwulan	4 (empat) dokumen dikali 5 (lima) tahun							
			(c) Penyusunan Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Rekonsiliasi Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes dan Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan setiap triwulan	4 (empat) dokumen dikali 5 (lima) tahun							
			3) Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang meliputi:										
			(a) Penyusunan Lap SIMAK BMN	Jumlah dokumen Laporan SIMAK BMN	Dokumen yang berisi Laporan SIMAK BMN Sekretariat BPPSDM Kesehatan Semester I dan Semester II(Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal	Menghitung jumlah dokumen laporan SIMAK BMN Set.BPPSDMK yang telah disusun setiap tahun							
			(b) Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan saran dan prasarana Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun							
		Meningkatnya manajemen kepegawaian dan ketatausahaan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan											
			1) Pengembangan Pegawai, yang meliputi:										
			(a) Pelaksanaan pengembangan karir pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen terkait dengan usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.	Dokumen pengembangan karir pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang terdiri dari usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.	Merekap dokumen pengembangan karir pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang terdiri dari usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat Teknis, Diklat Fungsional.							
			(b) Penyiapan data dalam rangka sertifikasi dosen Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah dokumen usulan pegawai yang akan mengikuti sertifikasi dosen	Dokumen usulan pegawai yang akan mengikuti sertifikasi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes RI	Menghitung dokumen usulan pegawai yang akan mengikuti sertifikasi dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes RI							

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)					Total Alokasi (Rp. Milyar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2015 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)	2019 (12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(13)	(14)
			2) Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian, yang meliputi:										SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
			(a) Tersusunnya dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang berasal dari Poltekkes, Bapelkes, BBPK dan Satker Pusat.	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun							
			(b) Tersusunnya dokumen mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen mutasi pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang berasal dari Poltekkes, Bapelkes, BBPK dan Satker Pusat.	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun							
			(c) Tersusunnya dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen pengisian jabatan di Poltekkes, Bapelkes, BBPK dan Satker Pusat pada Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun							
			3) Tata Usaha dan Gaji, yang meliputi:										
			(a) Terselenggaranya penyusutan arsip si Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip yang berasal dari Bagian-bagian pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun							
<b>X PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI</b>													
1.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi					730.0	909.0	939.5	968.2	998.3	4545.0	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI
			1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan							
			2) Peningkatan sarana dan prasarana di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya.	Satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya melalui pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, dan pengadaan operasional	Merekap jumlah satuan kerja yang telah menyelenggarakan pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, dan pengadaan operasional							
			3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI	Kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Menghitung kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit							
			4) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI dan diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi nasional/internasional	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes RI (sebagai peneliti utama) yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional	Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai jurusan/program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional							

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN  
TAHUN 2015-2019

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
								2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	STANDARDISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI SDM KESEHATAN												
1	Perencanaan dan Program	Tersusunnya dokumen perencanaan dan program Standardisasi Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	1 Perencanaan yang meliputi :  Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran  2 Program yang meliputi : Penyusunan dokumen pengelolaan program	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran  Jumlah dokumen pengelolaan program	Dokumen perencanaan dan anggaran  Dokumen pengelolaan program Pustanserdik	Menghitung jumlah dokumen perencanaan dan anggaran per tahun  Menghitung jumlah dokumen pengelolaan program Pustanserdik per tahun		3	2	2	2	2	PUSAT STANDARISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN
2	Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kesehatan	Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi SDM Kesehatan	1 Standarisasi SDM Kesehatan yang meliputi : Dokumen pengembangan profesi tenaga kesehatan  2 Sertifikasi SDM Kesehatan yang meliputi : Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan  Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	Dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan  Tenaga Kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi yang Memiliki STR	Menghitung jumlah dokumen kebijakan teknis pengembangan profesi tenaga kesehatan per tahun  Menghitung jumlah STR Tenaga Kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi yang diterbitkan per tahun	1	2	3	3	3		
3	Ketatausahaan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	1 Tata Usaha (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN (b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	2	2	2	2	2		
							2	2	2	2	2		
							2	2	2	2	2		
II	PENDIDIKAN TINGGI DAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN												
1.	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM	Pendidikan Berkelanjutan Tugas Belajar  1 Pendidikan Berkelanjutan yang meliputi : (a) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan PDS/PDGS (b) Pengembangan Keprofesian Kesehatan Berkelanjutan Dalam Rangka Penjaminan Mutu SDM Kesehatan  2 Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata yang meliputi : (a) Pemberian Bantuan Pendidikan Diploma dan Strata (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Diploma dan Strata	Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS  Jumlah Dokumen Pengembangan Keprofesian Kesehatan Berkelanjutan Dalam Rangka Penjaminan Mutu SDM Kesehatan  Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan Diploma dan Strata Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan Diploma dan Strata	Peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS  Dokumen Pengembangan Keprofesian Kesehatan Berkelanjutan Dalam Rangka Penjaminan Mutu SDM Kesehatan  Peserta baru penerima bantuan pendidikan Diploma dan Strata Dokumen Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan Diploma dan Strata	Menghitung jumlah Peserta baru penerima bantuan pendidikan PDS/PDGS  Menghitung Jumlah Dokumen Pengembangan Keprofesian Kesehatan Berkelanjutan Dalam Rangka Penjaminan Mutu SDM Kesehatan  Menghitung jumlah Peserta baru penerima bantuan pendidikan Diploma dan Strata Menghitung Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan Diploma	400	500	500	500	500	PUSAT STANDARISASI SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN	
							2	2	2	2	2		
							800	1,000	1,000	1,000	1,000		
							1	1	1	1	1		



NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
								2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN													
1	Penyusunan program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Tersusunnya rencana program dan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1) Program, meliputi (a) Kajian pendidikan tenaga kesehatan	Jumlah dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan	Dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan seperti kajian kurikulum, program studi, dll di institusi pendidikan tenaga kesehatan	Penjumlahan dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan seperti kajian kurikulum, program studi, dll di institusi pendidikan tenaga kesehatan		2	2	2	2	2	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
			2) Pengembangan, meliputi : (a) Pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	Jumlah dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	Dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III seperti pengembangan program PJJ	Penjumlahan dokumen pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes dari pendidikan JPM/DI ke D-III	5	5	5	5	5		
2.	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1) Pendidikan, meliputi : (a) Penyiapan bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan	Jumlah dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan	Dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan seperti pedoman, kurikulum inti D-III Jamu, D-IV Teknik Radiologi, D-IV Fisioterapi, D-IV Promkes, D-III Gizi, Analisis Kesehatan, dll	Penjumlahan dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan seperti D-III Jamu, D-IV Teknik Radiologi, D-IV Fisioterapi, D-IV Promkes, D-III Gizi, Analisis Kesehatan dll	6	6	6	6	6		
			2) Pelatihan, meliputi : (a) Pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui diklat bidang kesehatan terakreditasi yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang sudah terakreditasi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat.	jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi	1,200	2,310	2,550	2,790	3,090		
3.	Ketatausahaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1 Tata Usaha meliputi : (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN (b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2		
V PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI													
	Pengendalian mutu pendidikan pelatihan tenaga kesehatan	Terlaksananya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	1 Standarisasi meliputi : (a) Penyusunan Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan	Dokumen standar Pendidikan Tenaga Kesehatan standar sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, dll	Penjumlahan dokumen standar Pendidikan Tenaga Kesehatan standar sarana dan prasarana, laboratorium, perpustakaan, dll		3	3	3	3	3	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
			2 Pemantauan meliputi : (a) Pelaksanaan akreditasi bagi Prodi Poltekkes	Persentase prodi/Institusi Poltekkes yang terakreditasi baik	Jumlah program studi/ poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen.	Jumlah program studi/ poltekkes yang terakreditasi baik dibandingkan dengan jumlah prodi yang habis masa berlakunya dan prodi baru dikali seratus persen.	50%	60%	70%	75%	80%		



KEGIATAN PELAKSANAAN		SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	2015	2016	TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
VI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN													
1.	Perencanaan dan Pendayagunaan	Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri	1 Distribusi SDM Kesehatan meliputi : (a) Penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit  (b) Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat)  (c) Penugasan khusus tenaga kesehatan perseorangan	Jumlah dokter spesialis yang ditempatkan di Rumah Sakit  Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan khusus individual berbasis tim (Tim Nusantara Sehat)  Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan khusus perseorangan	Dokter spesialis anak, obgin, penyakit dalam, bedah, dan anastesi yang ditempatkan di Rumah Sakit  Tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesmas, tenaga kesling, tenaga gizi, dan tenaga teknis laboratorium) yang mengikuti penugasan khusus berbasis tim (Tim Nusantara Sehat)  Tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesmas, tenaga kesling, tenaga gizi, dan tenaga teknis laboratorium) yang mengikuti penugasan khusus perseorangan	Menghitung jumlah dokter spesialis anak, obgin, penyakit dalam, bedah, dan anastesi yang ditempatkan di rumah sakit  Menghitung jumlah Tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesmas, tenaga kesling, tenaga gizi, dan tenaga teknis laboratorium) yang mengikuti penugasan khusus berbasis tim (tim Nusantara Sehat)  Menghitung jumlah Tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesmas, tenaga kesling, tenaga gizi, dan tenaga teknis laboratorium) yang mengikuti penugasan khusus perseorangan			320	350	350	350	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
2.		Terselenggaranya Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri	1 Pendayagunaan SDM Kesehatan (a) Rekrutmen dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia ke luar negeri  2 Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga (a) Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Warga Negara Asing	Jumlah Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang direkrut untuk didayagunakan ke Luar Negeri  Jumlah propinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan Warga Negara Asing	Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang direkrut untuk didayagunakan ke Luar Negeri melalui pemerintah  Propinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan Warga Negara Asing	Menghitung jumlah Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia yang direkrut untuk didayagunakan ke Luar Negeri melalui pemerintah  Menghitung jumlah propinsi yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan Warga Negara Asing dalam satu tahun		50	50	55	55	60	
							8	15	17	25	34		
3	Ketatausahaan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Terlaksananya ketatausahaan perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	1 Tata Usaha (a) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN (b) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	
VII PERENCANAAN SDM KESEHATAN													
	Perencanaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan	1 Perencanaan kebutuhan SDMK yang meliputi : (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Nasional  2 Perencanaan pengembangan SDM Kesehatan, yang meliputi: (a) Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan SDMK	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Nasional  Jumlah dokumen kajian pengembangan SDMK	Dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Nasional baik tahunan, menengah dan Jangka Panjang  Dokumen kajian pengembangan SDMK	Menghitung jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan tahunan, menengah dan jangka panjang  Menghitung jumlah dokumen kajian pengembangan SDMK	2	2	2	2	3	1	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
VIII PELAKSANAAN INTERNSHIP													
	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	1. Pengembangan SDM Kesehatan meliputi : (a) Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip	Tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi) yang melaksanakan internsip	Menghitung jumlah Tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi) yang melaksanakan internsip		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	2015	2016	2017	2018	2019	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IX	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN												
1.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan	1) Program dan Anggaran meliputi: (a) Penyusunan rencana dan program Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang  (b) Penyusunan program dan anggaran tahunan  2) Data dan Informasi meliputi:  (a) Dokumen Data dan Informasi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Indonesia  3) Evaluasi dan Pelaporan meliputi: (a) Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang  Jumlah Dokumen program dan anggaran tahunan  Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan  Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Mid term Reviu RAP dan draft RAK.  Dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, dan RKA-K/L  Dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan  Dokumen Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan yang dihasilkan selama 1 Tahun yakni terdiri dari Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan), dan Laporan Midterm Review yang dihasilkan pada Tahun ke 3 (2017)	Menghitung jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang telah dibuat baik dalam bentuk bahan maupun draft  Menghitung jumlah dokumen yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran  Menghitung jumlah provinsi yang mengirimkan dokumen data dan informasi (profil) pengembangan dan pemberdayaan SDMK wilayahnya  Menghitung jumlah dokumen Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan yakni Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan) per Tahun, ditambah Laporan Midterm Review pada Tahun ke-3 (2017)		2	1	1	0	2	SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
							3	3	3	3	3	3	
							0	0	34	34	34	34	
							2	2	2	3	2	2	
2.	Pengembangan Hukum, Organisasi dan Humas	Terselenggaranya penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat	1) Hukum, yang meliputi : (a) Penyusunan Regulasi bidang SDM Kesehatan  (b) Layanan Hukum di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan  2) Organisasi meliputi: (a) Penyusunan Dokumen Organisasi dan  3) Hubungan Masyarakat meliputi: (a) Penyusunan dokumentasi, Informasi dan Kehumasan	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang SDM Kesehatan (Jumlah dokumen kebijakan teknis Program PPSDM Kesehatan)  Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang tertangani  Jumlah dokumen Organisasi dan  Jumlah jenis media informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak.	Jumlah dokumen kebijakan teknis/rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan  Permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani (tahap klarifikasi, peninjauan lapangan, kajian hukum, laporan, sampai penyelesaian)  Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan  Jenis media informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster dan roll banner terkait SDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan telah dilakukan pembahasan di internal PPSDM paling sedikit 2 kali. Dihitung selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun  Menghitung jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahun  Menghitung jumlah dokumen yang telah dibuat selama 5 Tahun dan dijabarkan setiap Tahun	166	20	20	20	20	20	
							20	10	10	10	10	10	
								2	3	2	1	1	
								6	6	6	6	7	



NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2018 (12)	2019 (13)	(14)
			(a) Terselenggaranya penyusutan arsip si Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip yang berasal dari Bagian-bagian pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1	1	1	AT BADAN SEHATAN
X PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI													
1.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI  2) Peningkatan sarana dan prasarana di Poltekkes Kemenkes RI  3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes RI  4) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI  Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya.  Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat non profit yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI  Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI dan diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi nasional/internasional	Peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan  Satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya melalui pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, dan pengadaan operasional  Kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit  Jumlah penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes RI (sebagai peneliti utama) yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan  Merekap jumlah satuan kerja yang telah menyelenggarakan pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, dan pengadaan operasional  Menghitung kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit  Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai jurusan/program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI
								6	14	21	31	38	
								76	114	152	190	228	
								15	38	76	114	152	

**KERANGKA PENDANAAN**  
**RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN**  
**TAHUN 2015-2019**

No	Kegiatan	ALOKASI PENDANAAN (Rp. Milyar)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan	20.13	200.00	250.00	300.00	350.00	1120.13
2	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM	446.00	800.00	900.00	1000.00	1100.00	4246.00
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	121.29	250.00	300.00	350.00	400.00	1421.29
4	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	15.03	558.00	563.00	546.00	601.00	2283.03
5	Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi	24.00	100.00	150.00	200.00	250.00	724.00
6	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	16.24	2550.30	2949.40	3348.40	3947.50	12811.84
7	Perencanaan SDM Kesehatan	0.00	49.70	50.60	51.60	52.50	204.40
8	Pelaksanaan Internship	250.00	750.00	800.00	850.00	900.00	3550.00
9	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	29.39	300.00	350.00	400.00	450.00	1529.39
10	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	690.02	1250.00	1400.00	1500.00	1600.00	6440.02
TOTAL		1612.10	6808.00	7713.00	8546.00	9651.00	34330.10

**KERANGKA PENDANAAN**  
**RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN**  
**TAHUN 2015-2019**

No	Kegiatan	ALOKASI PENDANAAN (Rp. Milyar)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	466.13	1000.00	1150.00	1300.00	1450.00	5366.13
2	Pelatihan SDM Kesehatan	121.29	250.00	300.00	350.00	400.00	1421.29
3	Pendidikan SDM Kesehatan	39.03	658.00	713.00	746.00	851.00	3007.03
4	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	16.24	2600.00	3000.00	3400.00	4000.00	13016.24
5	Pelaksanaan Internship	250.00	750.00	800.00	850.00	900.00	3550.00
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	29.39	300.00	350.00	400.00	450.00	1529.39
7	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	690.02	1250.00	1400.00	1500.00	1600.00	6440.02
TOTAL		1612.10	6808.00	7713.00	8546.00	9651.00	34330.10

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
2. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072).
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244)
4. Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609).
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 193).
6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan.
11. Kementerian Kesehatan, 2015, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Jakarta : Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Kesehatan
12. Kementerian PPN/Bappenas, 2014, *Kajian Sektor Kesehatan*, Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
13. Kementerian PPN/Bappenas, 2014, *Health Sector Review- Kumpulan Policy Brief*, Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.

## DAFTAR SINGKATAN

ABBM	: Alat Bantu Belajar Mengajar
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Balita
APIP	: Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Bapelkes	: Balai Pelatihan Kesehatan
BBPK	: Balai Besar Pelatihan Kesehatan
BMN	: Barang Milik Negara
BLU	: Badan Layanan Umum
BPPSDMK	: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
D I	: Diploma Satu
D III	: Diploma Tiga
D IV	: Diploma Empat
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
Diklat PIM	: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
DTPK	: Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan
FK	: Fakultas Kedokteran
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
Humas	: Hubungan Masyarakat
Itjen	: Inspektorat Jenderal
Ibel	: Ijin Belajar
Jpl	: Jam pembelajaran
JPM	: Jenjang Pendidikan Menengah
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
Kesling	: Kesehatan Lingkungan
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nakes	: Tenaga Kesehatan
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
RAP	: Rencana Aksi Program
RAK	: Rencana Aksi Kegiatan
RKA K/L	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Renstra	: Rencana Strategi
SIMAK BMN	: Sistim Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistim Akuntansi Instansi
Satker	: Satuan Kerja
Set Badan	: Sekretariat Badan
SDMK	: Sumber Daya Manusia Kesehatan
STR	: Surat Tanda Registrasi
TR PNBP	: Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tubel	: Tugas Belajar
PDS	: Pendidikan Dokter Spesialis
PDGS	: Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
PJJ	: Pelatihan Jarak Jauh
PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Prodi	: Program Studi
Promkes	: Promosi Kesehatan
PK BLU	: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Poltekkes : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat  
UPT : Unit Pelaksana Teknis  
UU : Undang-undang  
WHO : *World Health Organisation*

**PELINDUNG**

Usman Sumantri

**PENGARAH**

Asjikin Iman Hidayat Dachlan, Suhardjono, Meinarwati,  
Ahmad Subagyo Tancarino, Kirana Pritasari

**KONTRIBUTOR**

Abdurahman, Asep Zaenal Mustofa, Emmilya Rosa, Sidin Hariyanto, Dedeh Sya'adah,  
Angger Rina Widowati , Rahmat Kurniadi, IGM Wirabrata, Setyadi Nugroho, Agus  
Sri Sukoco, Ismawiningsih, Budiman, Dedi Supriadi, Syafdewiyani, Dewi Nuraini,  
Ira Liasari, Virfina, Siti Hajar, Hery Hermawanto, Ermawan

**TIM PENYUSUN/SEKRETARIAT**

Staf Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan